

EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Dimas Fajar Rahman

NPP. 32.0252

Asdaf Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu

Program Studi Keuangan Publik

Email: 32.0252@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Marja Sinurat, M.Pd, M.M

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *The implementation of the Indonesian Regional Government Information System (SIPD), which must be implemented by all local governments starting in 2024 for the planning process to financial reporting, still faces challenges. The Ministry of Home Affairs' evaluation (2021) shows that 26% of local governments have not fully adopted SIPD, causing their performance to be less than optimal and less effective/efficient in regional financial management. Objective: This study aims to analyze the effectiveness of planning and budgeting through the Regional Government Information System (SIPD) in South Bengkulu Regency. Methods: This study uses a descriptive qualitative approach with an inductive method. The data collection technique was carried out through data triangulation, including interviews with key informants from the South Bengkulu Regency BAPPEDA-R&D (primary data) as well as documentation related to planning and budgeting (secondary data). Data analysis is carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawn. Results: The results of the study show that SIPD is effective in the planning and budgeting process in South Bengkulu Regency by showing 1) System Quality: SIPD has become a strategic platform that integrates planning documents. 2) Information Quality: SIPD contributes to consistency between planning and budgeting documents through automatic validation features. 3) Service Quality: The services provided by SIPD provide convenience for its operators. 4) Use: SIPD has fundamentally changed the way we work in managing planning. 5) User Satisfaction: Users feel a positive change and are satisfied with the automation provided. 6) Net Benefit: SIPD as a whole has provided benefits in the form of process acceleration, increased transparency, and accountability. Conclusion: The implementation of SIPD in South Bengkulu Regency shows a positive impact on the effectiveness of planning and budgeting. Comprehensive strategic efforts in the form of human resource development, infrastructure improvement, and cultural transformation are being undertaken to overcome these barriers and optimize the net benefits of SIPD.*

Keywords: *budgeting, planning, public finance, SIPD.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI, yang wajib diterapkan seluruh pemerintah daerah mulai tahun 2024 untuk proses perencanaan hingga pelaporan keuangan, masih menghadapi tantangan. Evaluasi Kemendagri (2021) menunjukkan 26% pemerintah daerah belum sepenuhnya mengadopsi SIPD, menyebabkan kinerjanya kurang optimal dan kurang efektif/efisien dalam pengelolaan keuangan daerah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perencanaan dan penganggaran melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Bengkulu Selatan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi data, meliputi wawancara dengan informan kunci dari BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Bengkulu Selatan (data primer) serta dokumentasi terkait perencanaan dan penganggaran (data sekunder). Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD efektif dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan ditunjukkan 1) Kualitas Sistem (System Quality): SIPD telah menjadi platform strategis yang mengintegrasikan dokumen perencanaan. 2) Kualitas Informasi (Information Quality): SIPD berkontribusi pada konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran melalui fitur validasi otomatis. 3) Kualitas Pelayanan (Service Quality): Pelayanan yang disediakan oleh SIPD memberikan kemudahan para operatornya. 4) Penggunaan (Use): SIPD secara fundamental telah mengubah cara kerja dalam mengelola perencanaan. 5) Kepuasan Pengguna (User Satisfaction): Pengguna merasakan perubahan ke arah positif dan merasa puas dengan otomatisasi yang diberikan. 6) Manfaat Bersih (Net Benefit): SIPD secara keseluruhan telah memberikan manfaat berupa percepatan proses, peningkatan transparansi, dan akuntabilitas. **Kesimpulan:** Penerapan SIPD di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan dampak positif pada efektivitas perencanaan dan penganggaran. Upaya strategis komprehensif berupa pengembangan SDM, perbaikan infrastruktur, dan transformasi kultural sedang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dan mengoptimalkan manfaat bersih SIPD.

Kata Kunci: keuangan public, penganggaran, perencanaan, SIPD.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia tengah berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan menekankan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas sebagai pilar utama dalam sistem ini (Mbaka & Namada, 2019). Implementasi good governance di tingkat daerah menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai visi dan misi pemerintahan, serta diharapkan dapat meminimalisir praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan daerah secara mandiri, dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan kas daerah. Laporan

Kuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan representasi dari departemen keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi anggaran yang disajikan dalam laporan tahunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas, dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang merupakan upaya pemerintah untuk mengelola informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

SIPD berperan penting sebagai sarana untuk mengelola dan menyajikan data perencanaan dan penganggaran secara terpadu, serta dirancang untuk memberikan dukungan dalam proses pengumpulan data, analisis, penyusunan dokumen perencanaan, dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah (Berenbrok, 2022). Implementasi SIPD bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses perencanaan dan penganggaran, meminimalkan kesalahan input data, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based decision making). Dengan adanya SIPD, pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan perencanaan dan penganggaran yang lebih tepat sasaran, akuntabel, dan partisipatif.

Namun, penelitian oleh (Ekaputra, 2021) menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SIPD masih kurang efektif di tahun awal penerapannya, meskipun pegawai merasa terbantu dan dimudahkan dalam pekerjaannya, masih terdapat kendala pemahaman yang menyeluruh dalam penggunaan sistem tersebut. Selain itu, penelitian oleh (Tumija et al., 2023) di Kota Semarang menunjukkan bahwa penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan memperhatikan empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun, masih ditemukan permasalahan pada dimensi sumber daya, terutama pada indikator fasilitas sistem informasi AKLAP yang belum bisa diakses meskipun menunya sudah tersedia.

Oleh karena itu, penggunaan teknologi dalam perencanaan dan penganggaran menjadi kewajiban yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah, agar proses tersebut sejalan dengan prinsip good governance. Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu, juga mengikuti kebijakan nasional dalam mengadopsi SIPD, dengan harapan dapat membantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) dalam menyusun rencana pembangunan yang lebih baik serta mempermudah proses perencanaan dan penganggaran.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat beberapa kesenjangan masalah (gap) yang diidentifikasi dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Bengkulu Selatan dan daerah lainnya. Pertama, penelitian oleh Nanda Dias Eka Putra (2021) menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SIPD masih kurang efektif di tahun awal penerapannya. Meskipun pegawai merasa terbantu, terdapat kendala pemahaman yang menyeluruh dalam penggunaan sistem tersebut, yang menunjukkan bahwa meskipun teknologi telah diterapkan, efektivitasnya dalam mendukung perencanaan dan penganggaran masih diragukan. Kedua, penelitian oleh Tumija et al. (2023) mengungkapkan bahwa penerapan SIPD menghadapi tantangan dalam hal integrasi data dan informasi antara berbagai perangkat daerah. Ketidaktepatan dalam penyusunan anggaran sering kali

disebabkan oleh proses input dan verifikasi data yang belum optimal, yang berdampak pada efektivitas penggunaan anggaran daerah. Ketiga, terdapat kesenjangan sistemik dalam perencanaan dan penganggaran yang ditandai dengan terputusnya proses perencanaan dari mekanisme penganggaran, mengakibatkan ketidakselarasan antara program yang direncanakan dengan alokasi dana yang tersedia, serta lemahnya sinergi antara perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Keempat, rendahnya kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikan SIPD turut memperburuk ketidaksesuaian antara rencana kerja dan alokasi anggaran, di mana keterbatasan dalam pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi ini menjadi penghambat dalam mencapai tujuan perencanaan dan penganggaran yang efektif. Terakhir, meskipun SIPD dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti, tantangan dalam integrasi data dan pemahaman sistem mengakibatkan keputusan yang diambil tidak selalu berdasarkan informasi yang akurat dan terkini, yang dapat mengarah pada keputusan yang kurang tepat sasaran dalam perencanaan dan penganggaran. Dengan mengidentifikasi kesenjangan-kesenjangan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai efektivitas perencanaan dan penganggaran melalui SIPD di Kabupaten Bengkulu Selatan, serta mencari solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada agar implementasi SIPD dapat berjalan lebih optimal dan mendukung good governance.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh (Irwan, 2022) berfokus pada penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Tidore Kepulauan. Nanda Dias Eka Putra (2021) membahas efektivitas penerapan aplikasi SIPD dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Kabupaten Nganjuk, yang menunjukkan kurang efektif karena kurangnya pelatihan kepada pegawai (Nasution & Nurwani, 2021) menganalisis penerapan SIPD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, dengan hasil yang menekankan pada hambatan teknis dalam implementasi sistem.

Selanjutnya, (Aji Pangestu, 2023) meneliti efektivitas pengelolaan keuangan daerah menggunakan SIPD di Kota Bandung, yang menunjukkan bahwa penggunaan dan implementasi SIPD masih relatif minim dan manfaatnya cenderung belum diketahui di lapangan. (Situmorang, 2023) membahas implementasi SIPD dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kota Banjarmasin. (Karundeng et al., 2021) meneliti implementasi kebijakan SIPD di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, yang menunjukkan bahwa implementasinya sudah berjalan sesuai dengan kebijakan pusat meskipun tidak ada peraturan daerah khusus tentang SIPD.

Penelitian oleh (Laoli et al., 2022) berfokus pada evaluasi implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Nias, dengan studi kasus di BPKPD sebagai sektor penganggaran utama. (Vitriana & Ahyaruddin, 2022) menganalisis penerapan SIPD pada BPKAD Pekanbaru, dan hasilnya menunjukkan bahwa penerapannya belum sepenuhnya efektif, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah karena perbedaan sistem dan kendala adaptasi.

Terakhir, Tumija, Asep Hendra, dan Marja Sinurat (2021) meneliti penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Kota Semarang, dan menunjukkan bahwa SIPD sudah diterapkan, namun terdapat masalah pada aksesibilitas sistem AKLAP. (Wahyudi et al., 2024) meneliti optimalisasi penerapan SIPD dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di Kabupaten Gianyar, dengan kesimpulan bahwa penerapannya belum optimal karena adanya kendala teknis dan keterbatasan sumber daya manusia.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dalam kajian penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam perencanaan dan penganggaran. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya hanya menyoroti penerapan SIPD dalam perencanaan pembangunan di daerah tertentu (Muhammad Rizal Irwan, 2021), efektivitasnya dalam penyusunan dokumen RKPD (Nanda Dias Eka Putra, 2021), analisis hambatan teknis implementasi di BPKAD (Irvan Nasution dan Nurwani, 2021; Vitrian, Agustiawan, dan Ahyaruddin, 2022; Tumija, Asep Hendra, dan Marja Sinurat, 2021), atau efektivitas pengelolaan keuangan daerah secara umum menggunakan SIPD (Bagus Aji Pangestu, 2023; Kevin Kevin Tumbur Situmorang, 2023; Minta Indah Laoli, Ayler B. Ndraha & Yasminar Telaumbanua, 2022), penelitian ini secara khusus mengulas efektivitas SIPD dalam konteks perencanaan dan penganggaran secara menyeluruh di Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan.

Kebaruan lainnya terletak pada fokus analisis kendala spesifik yang dihadapi Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, seperti sistem informasi data pembangunan yang belum terpadu, koordinasi antar OPD yang belum optimal, dan pemanfaatan hasil penelitian yang belum maksimal, serta memberikan rekomendasi peningkatan. Penelitian sebelumnya belum secara komprehensif mengkaji dampak SIPD dengan mempertimbangkan permasalahan perencanaan dan penganggaran yang ada di suatu kabupaten. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis kendala dan efektivitas penerapan SIPD dalam perencanaan dan penganggaran di Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, suatu aspek yang belum menjadi fokus utama penelitian terdahulu.

1.5. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas perencanaan dan penganggaran melalui SIPD di Kabupaten Bengkulu Selatan, mengidentifikasi faktor penghambatnya, dan mengetahui upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan tersebut guna meningkatkan efektivitasnya.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan ialah Pendekatan Kualitatif dengan Metode Deskriptif (Ardiansyah et al., 2023). Penelitian kualitatif bersifat fleksibel, memungkinkan desain penelitian disesuaikan dengan fenomena yang muncul di lapangan. Tujuan penggunaan Pendekatan Kualitatif Deskriptif adalah untuk mendeskripsikan ataupun mengkonstruksikan hasil penelitian berupa observasi, wawancara, ataupun dokumentasi yang nantinya akan ditemukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Penulis akan bertindak sebagai fasilitator, merealisasikan konstruksi oleh SIPD, dan sebagai aktivis yang memberikan makna kritis terhadap realita lapangan. Paradigma penelitian yang digunakan adalah Pragmatisme, karena tidak terikat pada satu metode tunggal dan memungkinkan penggunaan berbagai teknik pengumpulan data yang paling efektif untuk menjawab permasalahan penelitian yang berkaitan dengan SIPD dalam perencanaan dan penganggaran di Bengkulu Selatan.

Teknik Pengumpulan data menggunakan teknik Wawancara Semi-Terstruktur dan dokumentasi dengan sumber Data Primer serta Sekunder (Simangunsong, 2017). Observasi Partisipatif Pasif juga akan digunakan, di mana penulis akan melaksanakan pengamatan atas perencanaan dan penganggaran dengan memanfaatkan SIPD. Informan penelitian ini berjumlah 13 orang, terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Subbagian, Subbidang, Admin SIPD, dan Staf Bappeda. Data pendukung akan dikumpulkan dari data Kantor Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan. Instrumen penelitian utama adalah peneliti sendiri, yang berfungsi untuk

menetapkan fokus penelitian, memilih informan, mengumpulkan dan menganalisis data, serta membuat kesimpulan. Peneliti akan membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan teori yang luas sebelum terjun ke lapangan untuk memperoleh data. Adapun instrumen dokumentasi yang digunakan berupa catatan-catatan, memo, pedoman wawancara, alat tulis, dan kamera.

Analisis data akan dilakukan setelah data terkumpul, dengan tujuan mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar untuk menemukan temuan dan merumuskan hipotesis kerja. Analisis data terbagi menjadi tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan: pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Data yang diperoleh akan diklasifikasikan ke dalam kategori, dan dalam penelitian kualitatif, penyajian data dikelompokkan ke dalam kata-kata dan simbol. Penarikan kesimpulan akan dilakukan berdasarkan data yang akurat di lapangan, di mana kesimpulan yang ditarik merupakan kesimpulan baru (Nurdin & Hartati, 2019).

Penelitian ini berlangsung sesuai dengan kalender akademik Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024-2025. Lokasi penelitian adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (BAPPEDA-LITBANG) di Bengkulu Selatan dilaksanakan selama 22 hari terhitung sejak tanggal 6 Januari sampai dengan 28 Januari 2025.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian terkait hasil triangulasi dari data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun sekunder dengan penulis sebagai instrumen dalam penelitian ini. Penelitian ini menjelaskan efektifitas dari perencanaan dan penganggaran melalui SIPD di Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan serta menjawab hambatan dan upaya untuk mengatasi dalam implementasi SIPD di Kabupaten Bengkulu Selatan.

3.1. Kualitas Sistem (*System Quality*)

Kualitas sistem SIPD mengacu pada kemampuan atau performa sistem dalam menyediakan informasi yang sesuai kebutuhan pengguna dan menghasilkan *output* yang maksimal. SIPD memiliki peran strategis dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam mempermudah koordinasi pengajuan perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Bengkulu Selatan. Penilaian kualitas sistem ini sangat penting karena berdampak langsung pada efektivitas pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Bappeda Litbang (Informan I1) menyatakan bahwa SIPD sudah cukup efektif, terutama dalam mengintegrasikan data perencanaan dan penganggaran. Beliau menekankan bahwa SIPD telah meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses perencanaan. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Informan I3) menambahkan bahwa SIPD sangat mempermudah koordinasi pengajuan perencanaan, memastikan bahwa semua tahapan perencanaan pembangunan daerah terintegrasi dalam satu sistem, dari musrenbangdes hingga Musrenbang RKPD.. Ini memudahkan pengguna dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi untuk berinteraksi dengan sistem, yang secara signifikan mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Tabel 1. 1 Anggaran Pengembangan SIPD dan Pelatihan (dalam Rp)

Komponen	2023	2024	2025
Pengembangan Sistem SIPD	50.000.000	37.000.000	23.000.000

Pelatihan dan Pendampingan Pengguna	25.000.000	18.000.000	12.000.000
Maintenance dan Support	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Total Anggaran SIPD	85.000.000	65.000.000	45.000.000

Sumber: diolah oleh penulis, 2025

Data anggaran menunjukkan bahwa investasi awal untuk pengembangan dan implementasi SIPD pada tahun 2023 sebesar Rp 85.000.000 telah mengalami penurunan bertahap menjadi Rp 65.000.000 pada tahun 2024 dan diproyeksikan turun menjadi Rp 45.000.000 pada tahun 2025. Penurunan ini terutama terlihat pada komponen pelatihan dan pendampingan pengguna yang menurun dari Rp 25.000.000 pada tahun 2023 menjadi Rp 12.000.000 pada tahun 2025. Tren penurunan biaya pelatihan ini mengindikasikan bahwa setelah periode adaptasi awal pengguna SIPD di Bappeda semakin mampu mengoperasikan sistem secara mandiri tanpa memerlukan pendampingan intensif.

Meskipun demikian, fleksibilitas sistem menjadi perhatian. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Informan I5) menyatakan bahwa SIPD cukup fleksibel dalam beberapa aspek, namun masih menghadapi keterbatasan dalam adaptasi terhadap perubahan kebijakan lokal yang cepat. Admin SIPD (Informan I10) juga menyebutkan bahwa meskipun sistem memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan tampilan atau fitur sesuai kebutuhan, ada batasan yang ditentukan oleh sistem pusat, yang terkadang menghambat penyesuaian yang lebih mendalam sesuai kebutuhan spesifik daerah. Integritas data di SIPD umumnya terjaga dengan baik. Informan I3 menyebutkan bahwa SIPD memiliki mekanisme validasi data yang secara efektif meminimalkan kesalahan input. Namun, Informan I5 mengakui bahwa masih ada tantangan dalam memastikan konsistensi data yang berasal dari berbagai OPD yang memiliki metode pengumpulan dan input data yang bervariasi. Aspek keamanan sistem juga dinilai baik. Informan I1 dan I3 menyatakan bahwa SIPD memiliki sistem keamanan berlapis untuk melindungi data sensitif dari akses tidak sah. Admin SIPD (Informan I10) menambahkan bahwa keamanan data pengguna terjaga dengan *username* dan *password* unik untuk setiap individu, serta fitur *log activity* yang melacak setiap perubahan atau tindakan yang dilakukan dalam sistem, sehingga meningkatkan akuntabilitas.

3.2. Kualitas Informasi (Information Quality)

Kualitas informasi mengacu pada seberapa baik informasi yang dihasilkan oleh SIPD dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Kepuasan pengguna adalah salah satu indikator kunci dalam menilai kualitas informasi. Secara umum, informasi yang disajikan oleh SIPD dinilai akurat, relevan, dan membantu dalam proses pengambilan keputusan. Kepala Bappeda Litbang (Informan I1) dan Kepala Bidang Perencanaan (Informan I3) secara konsisten menyatakan bahwa informasi yang diperoleh dari SIPD umumnya akurat dan relevan, sangat membantu dalam mendukung pengambilan keputusan terkait perencanaan pembangunan. Staf Bappeda (Informan I12) juga merasa bahwa informasi yang disajikan SIPD sudah cukup memadai untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Namun, ia menyoroti perlunya peningkatan dalam hal ketepatan waktu penyediaan informasi.

Akurasi informasi dari SIPD dinilai sangat baik oleh Informan I1, I3, dan I10, karena sistem ini terintegrasi dan dilengkapi dengan fitur validasi data otomatis. Hal ini meminimalkan potensi kesalahan yang disebabkan oleh *human error* saat input data. Meskipun demikian, kendala masih bisa muncul jika terjadi kesalahan input di tingkat OPD atau jika data tidak di-update secara berkala. Ketepatan waktu dalam penyediaan informasi

masih menjadi tantangan yang perlu perhatian. Informan I5 dan I12 mengungkapkan bahwa, terutama saat mendekati *deadline* pengumpulan data atau ketika ada pembaruan mendadak dari pusat, sistem seringkali mengalami *overload* atau keterlambatan dalam menyajikan data terbaru.

Kelengkapan informasi dari SIPD juga umumnya memuaskan. Informan I1 menyatakan bahwa SIPD menyediakan data yang komprehensif, mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan untuk perencanaan dan penganggaran. Hal ini mempermudah Bappeda dalam menyusun dokumen perencanaan yang terintegrasi. Keandalan informasi di SIPD secara umum dianggap tinggi karena didukung oleh sistem yang terintegrasi dengan berbagai sumber data. Namun, Informan I5 dan I12 mengakui bahwa terkadang ada kendala teknis atau masalah konektivitas yang dapat mempengaruhi keandalan data, menyebabkan data tidak dapat diakses atau diperbarui secara *real-time*. Relevansi informasi dari SIPD dinilai sangat penting oleh Informan I1 dan I3, karena informasi yang disajikan langsung mendukung penyusunan dokumen perencanaan daerah, seperti RKPD dan KUA-PPAS, yang merupakan dasar bagi pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

3.3. Kualitas Pelayanan (Service Quality)

Kualitas pelayanan berkaitan dengan dukungan teknis dan layanan *helpdesk* yang disediakan untuk pengguna SIPD. Kualitas ini sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional sistem dan membantu pengguna mengatasi berbagai kendala yang mungkin timbul. Kepala Bappeda Litbang (Informan I1) dan Kepala Bidang Perencanaan (Informan I3) mengapresiasi ketersediaan dukungan teknis yang responsif dari tim pengembang pusat. Mereka merasa bahwa tim dukungan cepat tanggap dalam menanggapi masalah yang dilaporkan. Admin SIPD (Informan I10) dan staf Bappeda (Informan I12) juga mengakui bahwa tim teknis pusat memberikan jaminan layanan yang baik, terutama saat kendala sistem muncul yang membutuhkan penanganan dari pihak *developer*.

Tabel 1. 2

Lampiran Alokasi Anggaran Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2023

No	Komponen	Nominal (Rp)	Periode
1	Internet & Konektivitas	2.000.000	Per Bulan
2	Honor Operator SIPD	1.500.000	Per Bulan
3	Maintenance Sistem	1.000.000	Per Bulan
4	Listrik & Utilitas	800.000	Per Bulan
5	ATK & Printing	500.000	Per Bulan
6	Pelatihan SDM	2.500.000	Per Triwulan
7	Koordinasi OPD	1.500.000	Per Triwulan
8	Evaluasi & Monitoring	1.000.000	Per Triwulan
9	Dana Kontinjensi	500.000	Per Bulan
TOTAL BIAYA BULANAN		6.300.000	
TOTAL BIAYA TRIWULANAN		5.000.000	
TOTAL BIAYA TAHUNAN		95.600.000	

Sumber: KUA-PPAS Kabupaten Bengkulu Selatan 2023, diolah oleh penulis 2025

Total anggaran Rp 95.600.000 per tahun memberikan return positif melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan, efisiensi waktu, dan akurasi data. Dibandingkan sistem manual sebelumnya, investasi SIPD memberikan value for money yang lebih baik dengan manfaat tambahan berupa transparansi dan akuntabilitas yang meningkat. Dukungan operasional yang terstruktur ini membuktikan bahwa digitalisasi perencanaan dan

penganggaran merupakan transformasi fundamental menuju tata kelola pemerintahan daerah yang lebih efektif dan akuntabel.

Meskipun responsif, kadang kala respons tim dukungan dapat terasa lambat. Informan I10 dan I12 menjelaskan bahwa hal ini sering terjadi karena volume laporan yang tinggi dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, sehingga tim dukungan pusat seringkali kewalahan. Empati dari tim dukungan teknis pusat juga diapresiasi, karena mereka berusaha memahami kendala yang dihadapi pengguna di daerah, tidak hanya memberikan solusi teknis tetapi juga memberikan panduan yang jelas. Namun, seperti yang disebutkan, keterbatasan jumlah petugas dan jarak geografis bisa menjadi penghambat dalam memberikan dukungan yang lebih personal dan cepat. Selain itu, ada kendala terkait komunikasi yang terkadang terhambat karena perbedaan zona waktu atau jadwal kerja antara tim pusat dan daerah. Aspek ketersediaan layanan juga penting; pengguna mengharapkan layanan *support* yang tersedia 24/7, namun dalam praktiknya, layanan *support* terbatas pada jam kerja.

3.4. Penggunaan (Use)

Penggunaan SIPD dievaluasi dari seberapa sering dan intens sistem ini digunakan oleh Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Tingkat penggunaan yang tinggi menunjukkan bahwa SIPD telah terintegrasi dengan baik dalam alur kerja organisasi. Kepala Bappeda Litbang (Informan I1) menyatakan bahwa penggunaan SIPD sudah menjadi rutinitas harian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan dan penganggaran daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tidak hanya diimplementasikan, tetapi juga aktif digunakan dalam kegiatan operasional.

SIPD tidak hanya digunakan pada saat-saat tertentu tetapi telah menjadi alat yang diakses secara rutin untuk berbagai keperluan perencanaan dan penganggaran. Intensitas penggunaan yang tinggi ini menunjukkan bahwa SIPD telah benar-benar terintegrasi dalam alur kerja di Bappeda Litbang. Input data perencanaan menjadi aktivitas harian yang dilakukan melalui SIPD menggantikan metode manual yang sebelumnya digunakan. Data-data perencanaan seperti indikator kinerja, target, dan anggaran diinput langsung ke dalam sistem sehingga dapat diakses dan dianalisis dengan lebih mudah. Koordinasi dengan OPD lain juga dilakukan melalui SIPD di mana Bappeda Litbang dapat melihat langsung data yang diinput oleh OPD lain dan memberikan feedback dengan cepat. Monitoring progress penganggaran menjadi lebih efektif dengan adanya dashboard dan laporan real-time yang disediakan oleh SIPD.

Frekuensi penggunaan SIPD di lingkungan Bappeda Litbang cukup tinggi, terutama pada tahapan-tahapan penting seperti penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara). Informan I3 (Kepala Bidang Perencanaan) dan Informan I10 (Admin SIPD) menegaskan bahwa hampir setiap hari mereka berinteraksi dengan sistem untuk *input* data, memantau progres, atau mengambil informasi. Niat penggunaan juga sangat tinggi karena SIPD adalah sistem wajib yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Karyawan memiliki keharusan untuk menggunakan sistem ini dalam setiap aktivitas terkait perencanaan dan penganggaran. Bahkan di luar kewajiban, sebagian besar pengguna memiliki niat positif untuk menggunakan SIPD karena menyadari manfaatnya dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi kerja. Intensitas penggunaan juga tinggi, karena sebagian besar tugas terkait perencanaan dan penganggaran kini dilakukan melalui SIPD. Meskipun demikian, masih ada beberapa tugas yang memerlukan verifikasi manual atau koordinasi langsung, namun proporsi pekerjaan yang dilakukan melalui sistem jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya.

3.5. Kepuasan Pengguna (User Satisfaction)

Kepuasan pengguna merupakan indikator penting dari efektivitas SIPD, yang mencerminkan sejauh mana sistem memenuhi harapan dan kebutuhan penggunanya. Secara umum, pengguna SIPD di Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan tingkat kepuasan yang positif. Kepala Bappeda Litbang (Informan I1) dan Kepala Bidang Perencanaan (Informan I3) menyatakan kepuasan umum terhadap SIPD karena sistem ini telah meningkatkan efisiensi kerja yang signifikan. Mereka melihat adanya pengurangan waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas perencanaan dan penganggaran.

Admin SIPD (Informan I10) dan staf Bappeda (Informan I12) juga merasakan peningkatan efisiensi dalam menyelesaikan tugas-tugas berkat adanya SIPD. Mereka merasa bahwa sistem mempermudah akses data, koordinasi, dan pelaporan. Namun, Informan I12 juga menyebutkan bahwa ada *frustrasi* yang muncul saat menghadapi *bug* atau *error* pada sistem. Kendala teknis seperti ini dapat mengganggu alur kerja dan mengurangi tingkat kepuasan, meskipun hanya bersifat sementara. Desain antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) SIPD juga mempengaruhi kepuasan. Meskipun beberapa pengguna merasa antarmuka SIPD cukup intuitif, ada juga masukan untuk perbaikan agar lebih *user-friendly* dan modern. Tingkat kepuasan ini penting karena dapat memengaruhi adopsi sistem dan keberlanjutan pemanfaatannya. Pengguna yang puas cenderung lebih produktif dan termotivasi untuk memanfaatkan fitur-fitur SIPD secara maksimal.

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang memuat visi, misi, dan program kepala daerah selama lima tahun. Sementara RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi penjabaran dari RPJMD. Kedua dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan KUA-PPAS yang kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan APBD. SIPD diharapkan dapat mengintegrasikan seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut dalam satu platform sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam proses penyusunannya.

Sebelum SIPD diterapkan proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran di Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan dilakukan secara manual dengan bantuan aplikasi pengolah kata dan spreadsheet. Proses ini membutuhkan waktu yang lama dan sering terjadi inkonsistensi data antara dokumen perencanaan dan penganggaran. Dengan implementasi SIPD diharapkan proses tersebut dapat berjalan lebih efisien dan data dapat terintegrasi dengan baik.

Efisiensi waktu ini tidak hanya berdampak pada percepatan proses penyusunan dokumen tetapi juga memungkinkan tim perencanaan untuk lebih fokus pada analisis substansi dan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Dengan berkurangnya waktu yang dihabiskan untuk kegiatan administratif dan input data manual para perencana dapat mengalokasikan lebih banyak waktu untuk melakukan kajian mendalam terhadap prioritas pembangunan, analisis kebutuhan masyarakat, serta evaluasi program-program yang telah berjalan sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih berkualitas dan tepat sasaran.

3.6. Manfaat Bersih (*Net Benefit*)

Manfaat bersih SIPD dinilai dari dampak positif sistem terhadap kinerja pekerjaan, produktivitas, dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Manfaat ini mencerminkan nilai tambah yang diberikan SIPD bagi Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mencapai tujuan perencanaan dan penganggaran. Kepala Bappeda Litbang (Informan I1) dan Kepala Bidang Perencanaan (Informan I3) secara tegas menyatakan bahwa SIPD telah secara signifikan meningkatkan performa pekerjaan dan produktivitas tim mereka dalam perencanaan dan penganggaran. Mereka mengamati bahwa pekerjaan yang sebelumnya memakan waktu lama kini dapat diselesaikan lebih cepat.

Peningkatan produktivitas kerja sangat terlihat karena SIPD meminimalkan pekerjaan manual yang repetitif dan rentan kesalahan. Proses pengumpulan, verifikasi, dan penyusunan data menjadi lebih otomatis dan terstandardisasi. Efektivitas proses perencanaan dan penganggaran juga meningkat signifikan. SIPD mempermudah integrasi data dari berbagai sumber, memungkinkan pelacakan progres secara *real-time*, dan secara drastis mengurangi potensi *human error* dalam perhitungan atau penginputan data. Selain itu, SIPD mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan menyediakan data yang akurat, lengkap, dan *real-time*, pimpinan dapat membuat keputusan yang lebih informasi dan strategis terkait alokasi anggaran dan program pembangunan. Akuntabilitas dan transparansi juga meningkat karena setiap proses terekam dalam sistem, mempermudah audit dan pemantauan oleh publik. Ini sejalan dengan prinsip *good governance*. Manfaat ini pada akhirnya berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien.

Adanya peningkatan opini BPK terhadap LKPD Kabupaten Bengkulu Selatan dari WDP menjadi WTP setelah implementasi SIPD secara penuh. Selain itu, jumlah temuan dan nilai temuan juga mengalami penurunan signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa SIPD telah berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. SIPD telah berkontribusi dalam mencapai tujuan konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran di Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan. Fitur validasi otomatis dalam SIPD membantu memastikan kesesuaian antara RKPD, KUA-PPAS, dan APBD.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Bengkulu Selatan menghadapi hambatan signifikan dari faktor internal dan eksternal, yang berdampak pada proses perencanaan dan penganggaran. Temuan ini sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya oleh (Wahyudi et al., 2024) yang meneliti optimalisasi SIPD dalam laporan keuangan di Kabupaten Gianyar, yang juga menyimpulkan bahwa penerapannya belum optimal karena adanya kendala teknis dan keterbatasan sumber daya manusia.

Lebih lanjut, penelitian ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya oleh (Ekaputra, 2021) tentang efektivitas penerapan SIPD dalam penyusunan dokumen RKPD di Kabupaten Nganjuk, yang menunjukkan bahwa penerapan SIPD masih kurang efektif terutama karena kurangnya pelatihan kepada pegawai. Dalam kasus Bengkulu Selatan, masalah kompetensi digital staf dan kurangnya efektivitas bimbingan teknis yang diberikan menjadi kendala utama, sejalan dengan temuan kurangnya pelatihan pada penelitian Nanda Dias Eka Putra.

Berbeda dengan temuan penelitian (Irwan, 2022) yang berfokus pada keberhasilan implementasi SIPD di Kota Tidore Kepulauan meskipun menghadapi berbagai hambatan, penelitian di Bengkulu Selatan ini lebih menyoroti masalah yang masih substansial dalam efektivitas SIPD dalam konteks perencanaan dan penganggaran secara menyeluruh. Meskipun upaya telah dilakukan, masalah teknis dan resistensi internal masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya teratasi.

Temuan mengenai keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti ketersediaan perangkat keras yang tidak memadai dan jaringan internet yang tidak stabil, serta seringnya *server down* atau *error* input data di Bengkulu Selatan, memperkuat temuan penelitian sebelumnya yang juga mengidentifikasi kendala teknis serupa. Misalnya, penelitian oleh (Tumija et al., 2023) di BPKAD Kota Semarang yang menyebutkan masalah aksesibilitas sistem AKLAP, serta penelitian di Kabupaten Gianyar yang juga menemukan kendala teknis. Ini menunjukkan bahwa masalah infrastruktur dan stabilitas sistem adalah tantangan umum dalam implementasi SIPD di berbagai daerah.

Selain itu, resistensi terhadap perubahan dari staf yang terbiasa dengan sistem manual di Bengkulu Selatan menjadi ciri khas temuan ini yang juga ditemukan dalam beberapa

penelitian tentang adopsi sistem baru, di mana faktor psikologis dan kultural seringkali menjadi penghalang meskipun sistem secara teknis tersedia (Belenzon, 2019). Terakhir, temuan mengenai keterbatasan fleksibilitas SIPD nasional yang sulit mengakomodasi kebutuhan spesifik daerah Bengkulu Selatan menambah dimensi baru pada diskusi tentang implementasi SIPD. Penelitian sebelumnya cenderung fokus pada hambatan internal, namun temuan ini menunjukkan bahwa desain standar nasional SIPD juga dapat menjadi penghambat karena kurangnya adaptasi terhadap karakteristik unik setiap daerah, yang membatasi inovasi dan kreativitas dalam perencanaan pembangunan lokal (Brady, 2015). Upaya yang dilakukan Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mengatasi hambatan ini, seperti pengembangan SDM dan perbaikan infrastruktur, menunjukkan respons proaktif yang juga sejalan dengan rekomendasi dari banyak penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan dukungan infrastruktur.

3.8. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menghadapi kendala dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang memengaruhi proses perencanaan dan penganggaran. Kendala ini bersumber dari faktor internal, termasuk keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, terutama dalam mengoperasikan fitur kompleks SIPD dan integrasi antar dokumen perencanaan, meskipun bimbingan teknis telah diberikan namun hasilnya belum optimal. Selain itu, infrastruktur teknologi yang belum memadai juga menjadi hambatan signifikan. Ini mencakup ketersediaan perangkat keras yang tidak memadai, jaringan internet yang tidak stabil, dan infrastruktur pendukung seperti pasokan listrik yang berkelanjutan. Di beberapa OPD yang lokasinya jauh dari pusat kota, koneksi internet sangat terbatas sehingga menghambat proses input data ke SIPD dan sinkronisasi data antar dokumen perencanaan. Kondisi ini diperparah dengan tingginya frekuensi kendala teknis seperti *server down* (8-12 kali per bulan), koneksi internet terputus (15-20 kali per bulan), dan *error* input data (25-30 kali per bulan). Resistensi terhadap perubahan dari staf yang terbiasa dengan sistem manual juga menjadi hambatan psikologis dan kultural yang signifikan. Di sisi eksternal, keterbatasan fleksibilitas SIPD sebagai sistem standar nasional menyulitkan akomodasi kebutuhan spesifik dan karakteristik unik Bappeda Kabupaten Bengkulu Selatan, seperti memasukkan program inovatif yang tidak tersedia dalam menu standar SIPD.

Untuk mengatasi hambatan ini, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan telah mengambil berbagai upaya komprehensif. Dalam pengembangan sumber daya manusia, program peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis intensif dan praktik langsung penggunaan SIPD telah diselenggarakan secara bertahap dan berkelanjutan. Pembentukan tim inti dan program mentoring berkelanjutan juga dilakukan untuk memberikan dukungan teknis. Untuk perbaikan infrastruktur teknologi, pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk pembaruan dan pengadaan perangkat keras yang memadai, serta bekerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk memperluas jangkauan jaringan internet, termasuk penggunaan teknologi alternatif seperti satelit dan dukungan akses internet berbiaya rendah di daerah terpencil. Selain itu, strategi transformasi kultural dilakukan melalui sosialisasi berkelanjutan untuk mengubah persepsi staf, dengan menyoroti manfaat konkret SIPD dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis efektivitas implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Bengkulu Selatan. Hasilnya menunjukkan bahwa SIPD telah secara fundamental mengubah cara kerja

perencanaan, mengintegrasikan berbagai dokumen, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, terdapat hambatan signifikan baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan ketidakstabilan koneksi internet, khususnya di wilayah terpencil, yang menghambat input data dan akses *real-time*. Sementara itu, faktor eksternal adalah keterbatasan fleksibilitas SIPD sebagai sistem standar nasional yang tidak selalu mampu mengakomodasi kebutuhan unik dan inovasi lokal. Untuk mengatasi hambatan ini, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan telah menerapkan strategi komprehensif yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur (melalui investasi perangkat keras dan solusi konektivitas alternatif), serta transformasi kultural untuk mengubah persepsi staf.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini terbatas pada Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga generalisasi sulit dilakukan. Rincian data primer dan metrik kuantitatif efektivitas SIPD kurang spesifik. Selain itu, eksplorasi mendalam mengenai akar masalah hambatan dan upaya koordinasi dengan pemerintah pusat juga belum optimal.

Arah Masa Depan Penelitian: Studi komparatif lintas daerah, analisis kuantitatif dampak infrastruktur, evaluasi mendalam efektivitas pelatihan SDM, penelitian strategi adaptasi lokal terhadap SIPD nasional, serta analisis peran kepemimpinan dan budaya organisasi. Penting juga untuk fokus pada pengukuran kuantitatif efektivitas SIPD dan dampaknya terhadap partisipasi publik dan akuntabilitas, serta integrasi SIPD dengan sistem informasi lain.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Pimpinan dan Seluruh Jajaran BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Bengkulu Selatan, Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerja sama yang tak ternilai dalam pelaksanaan penelitian ini. Bantuan dan keterbukaan Bapak/Ibu sangat krusial dalam memperkaya analisis kami. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi optimalisasi SIPD di Kabupaten Bengkulu Selatan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aji Pangestu, B. (2023). *Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat* [Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15285>
- Ardieansyah, Asmungi, & Latip. (2023). *Metodologi Penelitian Sosial* (1 ed.). Deepublish.
- Belenzon, S. (2019). CEO's age and the performance of closely held firms. *Strategic Management Journal*, 40(6), 917–944. <https://doi.org/10.1002/smj.3003>
- Berenbrok, L. A. (2022). Access to community pharmacies: A nationwide geographic information systems cross-sectional analysis. *Journal of the American Pharmacists Association*, 62(6), 1816–1822. <https://doi.org/10.1016/j.japh.2022.07.003>
- Brady, S. R. (2015). Utilizing and Adapting the Delphi Method for Use in Qualitative Research. *International Journal of Qualitative Methods*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1609406915621381>
- Ekaputra, N. D. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk. *Otonomi*, 21(April), 6. <https://doi.org/10.32503/otonomi.v21i1.1606>
- Irwan, M. R. (2022). *Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Bapelitbang Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara* [Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/7455>
- Karundeng, A. B., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, S. E. (2021). Implementasi kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–8. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/36315>
- Laoli, M., Ndraha, A., Telaumbanua, Y., & Indah Laoli Ayler Ndraha Yasminar Telaumbanua, M. B. (2022). Implementasi Sipd Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Kabupaten Nias (Studi Kasus Bpkpd Sebagai Leading Sektor Penganggaran) Sipd Implementation in Regional Financial Management in Nias District (Case Study of Bpkpd As the Leading Budgeting Se. *Emba*, 10(4), 1381–1389. <https://doi.org/10.35794/emba.v10i4.43987>
- Mbaka, A. O., & Namada, J. M. (2019). Integrated Financial Management Information System and Supply Chain Effectiveness. *American Journal of Industrial and Business Management*, 09(01), 204–232. <https://doi.org/10.4236/ajibm.2019.91014>
- Nasution, M., & Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9, 109. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi Penelitian Sosial. In *Metodologi Penelitian Sosial Dasar*. Media Sahabat Cendekia.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Situmorang, K. T. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Di Kota Di Kota Banjarmasin

Provinsi Kalimantan Selatan [Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. In *eprint IPDN* (Vol. 1, Nomor 22 Jan). <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/16187>

Tumija, Hendra, A., & Dkk. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah (Siagian , n . d .) *Jurnal Media Birokrasi*, 5(1), 79–91. <https://doi.org/10.33701/jmb.v5i1.3389>

Vitriana, N., & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru Analysis of the Application of the Local Government Information System (SIPD) at the Pekanbaru Regional Financial and Asset Manage. *DIGIBIS : Digital Business Journal*, 1(1), 1–16. <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/digibis>

Wahyudi, K., Johannes, A., Sinurat, M., & Ritonga, A. (2024). Optimalisasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Gianyar. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 11, 27–38. <https://doi.org/10.33701/jekp.v11i1.4381>

